

(lambang garuda emas)

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR: /KPTS/II/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA... TAHUN.....

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten/Kota.... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang sesuai dengan substansi yang akan diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota..... Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Walikota ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran.....
- KETIGA : Dalam hal tertentu terdapat kebutuhan yang dipandang perlu dan mendesak untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengusulkan kembali Rancangan Peraturan Bupati/Walikota untuk dimasukkan ke dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun
- KEEMPAT : Kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa yang terkait langsung secara substansi dengan agenda Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tersebut, agar segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dengan mengkoordinasikan bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.... dengan melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya yang dipandang perlu, dan memperhatikan tahapan/ mekanismenya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati/Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada masing-masing Perangkat Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki

kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati/Walikota ini.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI/WALIKOTA.....

.....

- Tembusan:
- 1. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
 - 2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
 - 3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/kota..... di Palembang
 - 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumsel di Palembang

Paraf Hierarki

No	Nama	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	1.
2.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	2.
3.	Kepala Bagian Hukum Setda	3.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA
NOMOR : /KPTS/II/2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA... TAHUN 2025

RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA..... TAHUN 2025

JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	STATUS		PD/Unit Kerja	TARGET PENYAMPAIAN	KET
	BARU	UBAH			
Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) Provinsi Sumatera Selatan	√		BAPPEDA	Januari	

BUPATI/WALIKOTA

.....

Paraf Hierarki

No	Nama	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	1.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	2.
3.	Kepala Bagian Hukum Setda....	3.